
PERSEPSI MASYARAKAT KELURAHAN PINOKALAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN PINOKALAN KOTA BITUNG SULAWESI UTARA

Audrey B. Runtukahu¹, Ferdinand Kerebungu², Yoseph D.A. Santie³

^{1,2,3}Universitas Negeri Manado

¹runtukahuaudrey7@gmail.com, ²ferdinankerebungu@gmail.com, ³yosephsantie@unima.ac.id

Diterima	05	Juni	2021
Disetujui	30	Juni	2021
Dipublish	30	Juni	2021

Abstract

The problem in this study is about the perception of pinokalan village community regarding the assistance of Kota Tanpa Kumuh Program (KOTAKU) where they are concerned about the inability of the opportunity to receive this assistance and the purpose of this research is to know and describe the perception of pinokalan village community in the implementation of KOTAKU program. In this study using qualitative research method with observation and interview data collection techniques. And the results of this study show that the perception of the people of Pinokalan Village that we do not receive assistance kotaku program from the government when our environment is organized and not worth our stay because of the densely populated conditions and only a few residents of our village who get assistance in the form of home improvement, roads and drainage but it is an assistance from PNPM not from KOTAKU and the government only chooses milih residents for i kut in socialization therefore we as other pinokalan community do not know and only know from others that socialization has been implemented about KOTAKU in Pinokalan Village. In the PROGRAM KOTAKU Pinokalan village is used as a companion village when compared to other villages that get assistance from KOTAKU Pinokalan Village can be said to be more eligible to get assistance from this KOTAKU program.

Keywords: *Public Perception, Slums, KOTAKU Program*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini tentang persepsi masyarakat Kelurahan Pinokalan mengenai bantuan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dimana mereka memperlakukan ketidakdapatnya kesempatan dalam menerima bantuan ini dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat kelurahan pinokalan dalam pelaksanaan program KOTAKU. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kelurahan Pinokalan bahwa kami tidak menerima bantuan Program KOTAKU dari pemerintah padahal lingkungan kami sudah tertata dan tidak layak untuk kami tempati karena kondisi yang padat penduduk dan hanya beberapa warga masyarakat dari kelurahan kami yang mendapatkan bantuan berupa perbaikan rumah, jalan dan drainase tetapi itu merupakan bantuan dari PNPM bukan dari KOTAKU dan pihak dari pemerintah hanya memilih milih warga untuk ikut dalam sosialisasi maka dari itu kami sebagai masyarakat pinokalan yang lain tidak tahu dan hanya mengetahui dari orang lain bahwa sudah dilaksanakan sosialisasi tentang KOTAKU di Kelurahan Pinokalan. Dalam program KOTAKU Kelurahan Pinokalan dijadikan sebagai kelurahan pendamping jika dibandingkan dengan kelurahan lainnya yang mendapat bantuan dari KOTAKU Kelurahan Pinokalan bisa dikatakan lebih layak untuk mendapatkan bantuan dari program KOTAKU ini

Kata kunci: *Persepsi Masyarakat, Permukiman Kumuh, Program KOTAKU*

Pendahuluan

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas).

Pencegahan dan pengurangan kualitas permukiman kumuh telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. Penanganan kawasan kumuh secara jelas ditargetkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan target terciptanya Kota bebas kumuh di tahun 2019 melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman, Direktorat Jendral Cipta Karya yang menginisiasi pembangunan kolaborasi melalui Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Berdasarkan dari data yang ada yaitu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 menunjukkan bahwa Kota Bitung yang terdiri dari 13 Kawasan ini ada 12 Kawasan yang dinyatakan tidak kumuh yang artinya mereka masuk di daftar kelurahan pendamping yang berarti masih dipantau untuk menerima bantuan KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) seperti pemukiman warga, karena sejauh ini program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang dilakukan hanya seputar sosialisasi dan pelatihan kepada warga dimana kawasan yang tidak kumuh ini diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk menghindari dari terjadinya kawasan Hampir kumuh atau Kumuh. Sehingga program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) yang masuk sebagian adalah bentuk sosialisasi dan pelatihan pemberdayaan saja.

Di Kota Bitung Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) hanya meninjau

wilayah kumuh berdasarkan kawasannya saja, karena sesuai dengan SK Kumuh Walikota Bitung meninjau bahwa adanya kelurahan dari tiap-tiap kecamatan yang hanya menjadi wilayah pendamping saja, dari 8 Kecamatan dan 69 Kelurahan yang ada di Kota Bitung hanya ada beberapa kelurahan yang mendapat bantuan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) sendiri memberi kemudahan kepada para warga selain program perumahan, ada program pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat akan tetapi di Kecamatan Ranowulu ada 11 kelurahan dan hanya ada 2 kelurahan yaitu Kelurahan Batu Putih Atas dan Kelurahan Batu Putih Bawah yang mendapat program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) ini, dan masih ada 9 kelurahan lagi yang belum mendapat program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Dalam program KOTAKU ini ada beberapa kelurahan yang disebut sebagai kelurahan pendamping salah satunya yaitu Kelurahan Pinokalan. Kelurahan pendamping ini adalah kelurahan yang masih dalam tinjauan dari Koordinator Kota yang mengurus program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) untuk mencegah pemeliharaan kualitas permukiman agar tidak berkembang permukiman kumuh yang baru.

Kelurahan Pinokalan sebagai salah satu kelurahan pendamping dimana masyarakatnya sudah menerima dengan baik bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), namun mengingat angka kepadatan penduduk dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi serta mata pencaharian yang rendah membuat masyarakat Kelurahan Pinokalan sangat berkeinginan untuk membuat perubahan dalam hidup salah satunya dengan merubah wajah permukiman/rumah dari kumuh menjadi tidak kumuh.

Walaupun saat ini Kelurahan Pinokalan tidak masuk dalam daftar penerima bantuan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) dan hanya masuk dalam kelurahan pendamping akan tetapi masyarakat Kelurahan Pinokalan sangat

berharap penuh kepada pemerintah setempat lebih khusus Koordinator Kota untuk meninjau kembali permukiman/rumah kumuh agar bisa mendapat bantuan dari program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini difokuskan pada : Persepsi Masyarakat Kelurahan Pinokalan dalam pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung Sulawesi Utara lebih khususnya wilayah permukiman kumuh yang ada di Kelurahan Pinokalan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat dalam pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pinokalan Kota Bitung Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu bagi Pemerintah Kelurahan Pinokalan dan Kota Bitung agar dapat diperhatikan dan juga dapat di jadikan bahan ajar di SMA Kelas XII Kurikulum 2013 pada mata pelajaran sosiologi materi kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas.

Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dapat dijadikan bahan ajar pada mata kuliah di Prodi Pendidikan Sosiologi khususnya mata kuliah Sosiologi Perkotaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Untuk mengkaji masalah tersebut peneliti menggunakan teori pemberdayaan masyarakat Menurut Sumaryadi (2005:11) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan.

Sedangkan menurut Menurut Widjaja (2003:169) Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat

mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya. Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling) logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi terkadang mereka kurang menyadari adanya daya dalam mereka, oleh karena itu daya harus digali dan dikembangkan.

Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat terperangkap dalam ketergantungan, tetapi sebaliknya pemberdayaan harus mengantarkan masyarakat pada kemandirian (Tri Winari, 1998:76). Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, ketidakterdayaan. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut.

Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2015:309) dengan menggunakan Teknik analisis data teknik analisis data menurut Miles and Huberman. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara wawancara dan observasi.

Hasil dan Pembahasan

Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang

bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014: 87).

“Segala kebijakan pembangunan di pedesaan secara keseluruhan diatur oleh desa sendiri dan pemerintah daerah tinggal mensupport baik material maupun moral sehingga desa benar-benar mandiri dalam menentukan apa yang hendak dicapai untuk kemajuan masyarakatnya sendiri (Kerebungu, F., & Fathimah, S. 2020). Program KOTAKU termasuk salah satu program dimana memberdayakan masyarakat agar bisa mandiri dan menemukan tujuan serta menciptakan alternatif baru dalam lingkungan masyarakat dalam hal ini bukan bergantung atau berharap saja karena ada program pemerintah sehingga masyarakat akan merasa malas dan hanya mengharapkan bantuan saja, sehingga hal ini akan bertentangan dengan tujuan dan arti dari pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya. Pada kenyataan yang ada di lapangan Kelurahan Pinokalan terkait dengan program KOTAKU ini menimbulkan banyak persepsi dari masyarakat ketidak terbukaan program ini mengakibatkan tanda tanya dilingkungan masyarakat yang menerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan. Sesuai dengan persiapan yang ada program KOTAKU ada 4 tahap yaitu tahap pertama adalah Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan dan terakhir Tahap Keberlanjutan.

Adapun persiapan awal ini meliputi identifikasi pelaku yang sekiranya terkait dengan isu kekumuhan, Pengumpulan data dan Informasi mengenai kondisi atau skala kumuh di tingkat Kabupaten/Kota menyusun indikasi target atau sasaran program yang akan disampaikan pada saat sosialisasi kepada pemangku kepentingan

terkait. Jika persiapan awal sudah matang maka dinas terkait akan melakukan sosialisasi tahap awal yang pelaksanaannya di berbagai media dan dilakukan dari tingkat Kabupaten/Kota hingga ke tingkat lingkungan dengan target sebanyak mungkin warga kota tahu dan memahami program KOTAKU.

Sesuai dengan proses tahapan awal seharusnya masyarakat sudah mengetahui yang dilaksanakan di kelurahan mereka khususnya kelurahan Pinokalan, namun fakta yang terjadi di Kelurahan Pinokalan saat ini tahapan pertama dari persiapan sampai sosialisasi awal tidak ada keterbukaan dilingkungan kelurahan bahkan hal ini juga tidak diketahui oleh pemerintah setempat seperti kepala lingkungan yang ada. Hal ini jelas sudah menyalahi prosedur awal dari tujuan dan sasaran program KOTAKU karena berdasarkan fakta yang ada kondisi kelurahan Pinokalan memang layak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah salah satunya pemukiman warga yang sudah tidak sehat karena lingkungan mereka tinggal tidak lagi sehat hal ini dikarenakan lingkungan mereka terlihat kumuh dengan adanya posisi rumah yang saling berdempetan dan tidak ada akses untuk area bersih.

Itulah mengapa mereka sangat berharap adanya bantuan dari pihak pemerintah, namun sementara itu menurut pihak pendamping KOTAKU kelurahan pinokalan bukanlah sebagai kelurahan untuk menerima bantuan program KOTAKU karena kelurahan pinokalan hanya sebagai kelurahan pendamping saja bukan sebagai kelurahan yang berhak menerima atau akan menerima program KOTAKU. Terkait dengan sosialisasi awal yang tidak terbuka yang pernah terjadi dilingkungan mereka adalah tahapan awal dan sosialisasi awal yang dihadiri oleh beberapa orang saja, namun sesuai dengan maksud dan tujuan awal dari program KOTAKU yang telah dijelaskan di awal bahwa harus sesuai dan tepa sasaran sesuai dengan data apakah kelurahan ini berhak menerima atau tidak tentunya sudah berdasarkan dengan data awal dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah bahwa memang kelurahan pinokalan bukan sebagai penerima hanya sebagai pendamping saja.

Hal ini menyebabkan mengapa hanya ada sosialisasi tahapan awal meskipun disini sangat disayangkan tidak diketahui oleh masyarakat banyak dan pemerintah lingkungan yang ada sehingga menimbulkan persepsi dari masyarakat bahwa mereka tidak dilibatkan tentunya.

Sehingga untuk tahapan selanjutnya yaitu tahapan perencanaan dimana tujuan dari tahapan ini meliputi tahapan membangun visi Permukiman dimaksudkan mengajak seluruh pelaku yang terlibat dalam penanganan kumuh untuk bersama-sama merumuskan cita-cita permukiman ideal seperti apa yang diharapkan pada masa depan kotanya, sehingga semua aktifitas tahapan dalam penanganan kumuh digerakan oleh visi bukan hanya digerakan untuk memecahkan persoalan yang ada.

Kembali ke kondisi masyarakat kelurahan Pinokalan yang jika dilihat memang seharusnya mereka mendapatkan bantuan pemukiman setelah melihat kondisi yang ada dimana lokasi rumah tempat tinggal yang tidak layak dalam artian sudah padat penduduk mereka membenarkan bahwa seharusnya mereka mendapatkan bantuan itu tapi mengapa di tahapan selanjutnya atau tahapan ini sama sekali tidak dilaksanakan kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan tempat tinggal mereka, ada yang diperbaiki rumah mereka namun menurut mereka itu adalah PNPM bukan program KOTAKU seperti yang dijelaskan di awal kekeliruan di tahap awal mengakibatkan persepsi dari berbagai pihak dalam masyarakat. Tahapan ini dimaksudkan untuk menyepakati baseline data yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam penanganan permukiman kumuh, serta digunakan untuk mengukur keberhasilan intervensi penanganan kumuh.

Kegiatan ini melibatkan semua sektor yang terkait dengan data dan informasi permukiman khususnya permukiman kumuh. Tahapan kegiatan ini dimulai dari pengumpulan data, konsolidasi data hingga verifikasi SK Kumuh Kabupaten/Kota terhadap data eksisting.

Pada tahapan-tahapan diatas

kelurahan hanya sampai di tahapan persiapan yaitu sosialisasi namun itu pun tidak berjalan sebagaimana mestinya hal ini dikarenakan pihak pengelola dan pemerintah lingkungan setempat tidak saling berkontribusi, hal ini jelas di lapangan ketika ditanyakan perihal program KOTAKU masyarakat dan juga pemerintah atau kepala lingkungan tidak satu suara atau membenarkan jika kelurahan mereka memang menerima bantuan atau program KOTAKU ini. Tahapan sosialisasi yang pernah dilakukan hanya berlaku pada oknum-oknum atau masyarakat tertentu saja bukan seluruh lingkungan kelurahan Pinokalan yang berhak untuk menerimanya hal inilah mengakibatkan masyarakat banyak bertanya-tanya soal keberadaan Program KOTAKU ini

Kelurahan pinokalan bahkan sama sekali tidak mengetahui tentang program KOTAKU ini, begitu juga dengan program-program dari KOTAKU, selain itu sumber yang mereka dapatkan adalah keluarga dan kenalan mereka yang berasal dari kelurahan atau daerah lain. Yang artinya pemerintah memang tidak mensosialisasikan ini secara terang-terangan atau bahkan hanya untuk penerima bantuan KOTAKU yang dipilih saja, karena dari data yang ada mereka mengatakan memang sama sekali tidak mengetahui apa-apa terkait program KOTAKU ini.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan prosedur atau tahapan yang seharusnya dilakukan soal program KOTAKU ini 4 tahapan yang dimaksud seperti Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan dan terakhir Tahap Keberlanjutan tidak berjalan baik dan masyarakat kelurahan Pinokalan juga sama sekali tidak mengetahui apakah program yang dilakukan di lingkungan mereka adalah program KOTAKU atau program pemerintah lainnya seperti PNPM dan sebagainya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang persepsi masyarakat Kelurahan Pinokalan dalam pelaksanaan program kota tanpa kumuh (KOTAKU) di

Kelurahan pinokalan Kota Bitung Sulawesi Utara maka dapat disimpulkan bahwa :

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pinokalan tidak berjalan sebagaimana mestinya, 4 tahapan program KOTAKU mulai dari tahap persiapan awal/ sosialisasi, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap keberlanjutan. Tahap awal/sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik mengakibatkan munculnya berbagai persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat Kelurahan Pinokalan bahwa kami tidak pernah menerima bantuan Program KOTAKU dari pemerintah padahal lingkungan kami sudah tidak tertata dan tidak layak untuk ditempati karena kondisi yang padat penduduk dan hanya beberapa warga masyarakat dari kelurahan kami yang mendapatkan bantuan berupa perbaikan rumah, jalan dan drainase tetapi itu merupakan program dari PNPM bukan dari program KOTAKU dan pada saat mereka melakukan sosialisasi pihak dari pemerintah hanya memilih milih warga untuk ikut dalam sosialisasi maka dari itu kami sebagai masyarakat pinokalan yang lain tidak tahu dan hanya mengetahui dari orang bahwa sudah dilaksanakan sosialisasi tentang KOTAKU di Kelurahan Pinokalan.

Dalam program KOTAKU Kelurahan Pinokalan hanya dijadikan sebagai kelurahan pendamping dan jika dibandingkan dengan kelurahan lain yang mendapat program KOTAKU kelurahan kami pun sangat layak untuk menerima program ini karena penduduk yang semakin padat dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi bahkan penghasilan yang rendah serta wilayah permukiman yang sudah tidak tertata dengan baik.

Daftar Pustaka

- Kerebungu, F., & Fathimah, S. (2020). Pembangunan PLTA Palu-3 (Kajian Sosiologis-Antropologis atas Gagalnya Pembangunan PLTA Palu-3 di Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah). *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, 2 (1), 10-17. <https://doi.org/10.52483/ijsted.v2i1.17>
- Mardikanto Totok, (2014), CSR

(Corporate Sosial Responsibility) Tanggung Jawab Sosial, Cetakan-1, Bandung, Alfabeta.

- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Tri, Winarni. (1998). *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21: menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta. Aditya Media.
- Widjaja, HAW. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada